

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VI DPR RI  
B I D A N G  
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN,  
INVESTASI, DAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

---

Tahun Sidang	: 2009-2010
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 21
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 18 Februari 2010
W a k t u	: Pukul 09.00 s/d 13.40 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
A c a r a	: 1. Pengantar Ketua Rapat; 2. Penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan atas pertanyaan tertulis Komisi VI DPR RI 3. Tanya Jawab 4. Penutup
Ketua Rapat	: Aria Bima didampingi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI (Ir. Nurdin Tampubolon)
Sekretaris Rapat	: Wahyu Prameswari, SH, M.Si (Kabagset Komisi VI)
Hadir	: A. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan beserta jajaran B. 41 orang dari 52 orang Anggota.

**KESIMPULAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan dibuka pada pukul 09.30 WIB setelah kuorum terpenuhi, dan sifat rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan untuk menyampaikan penjelasan atas pertanyaan tertulis Komisi VI DPR RI.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Komisi VI DPR RI untuk menanggapi atas penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan.

## II. KESIMPULAN

1. Mengingat realisasi pelaksanaan anggaran (DIPA) dari ;
  - a) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam APBN 2009 mencapai Rp.311.622.419.238,- (Tiga ratus sebelas miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) atau 82,70% dari DIPA tahun 2009 yang berjumlah Rp.376.815.006.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus lima belas juta enam ribu rupiah), dan anggaran pada Tahun 2010 sebesar Rp.364.967.710.000,- (Tiga ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
  - b) Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam APBN 2009 mencapai Rp.51.655.600.000,- (Lima puluh satu miliar enam ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau mencapai 87,01% dari DIPA tahun 2009 yang berjumlah Rp.60.710.161.000,- (Enam puluh miliar tujuh ratus sepuluh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah), dan anggaran pada Tahun 2010 sebesar Rp.61.004.503.000,- (Enam puluh satu miliar empat juta lima ratus tiga ribu rupiah);
  - c) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam APBN 2009 mencapai Rp.56.480.249.755,- (Lima puluh enam miliar empat ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) atau 68,8% dari DIPA tahun 2009 yang berjumlah Rp.82.089.300.000,- (Delapan puluh dua miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), dan anggaran pada Tahun 2010 sebesar Rp.82.313.900.000,- (Delapan puluh dua miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

maka, Komisi VI DPR RI mendesak agar BKPM, BSN, dan KPPU melakukan koordinasi percepatan pelaksanaan program dan optimalisasi penggunaan anggaran Tahun 2010, sehingga kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2. Dalam upaya mengefektifkan pembahasan anggaran, Komisi VI DPR RI, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Standardisasi Nasional, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sepakat untuk melakukan pembahasan baik Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2010 maupun penyerapan Anggaran Tahun 2010 termasuk rincian rencana kegiatan, sasaran dan target penyelesaian kegiatan tersebut melalui Pokja Koperasi, UKM, dan Investasi, Pokja Perindustrian, dan Pokja Perdagangan. Selanjutnya, hasil pembahasan tersebut dilaporkan kepada Rapat Komisi VI DPR RI untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BKPM RI, Kepala BSN dan Sekjen KPPU.
3. Dalam rangka peningkatan daya saing dan perlindungan produk dalam negeri terutama setelah pelaksanaan AFTA dan ACFTA, Komisi VI DPR RI meminta kepada BKPM, BSN, dan KPPU untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam memfasilitasi investasi dan perdagangan dengan kompetisi yang sehat dalam mendorong industri untuk menghasilkan produk nasional dengan standar yang kompetitif di pasar domestik maupun di pasar global.

*Sol*

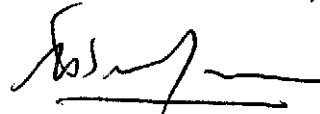
4. Komisi VI DPR RI meminta BKPM, BSN, dan KPPU untuk meningkatkan perencanaan programnya agar lebih fokus dan berorientasi dalam memfasilitasi tumbuhnya industri hilir, dan keterkaitan industri hulu dan hilir yang memproduksi produk-produk yang sangat dibutuhkan bangsa terutama untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk yang masih diimpor (substitusi impor).

### III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat ditutup pada pukul 17.35 WIB.

Jakarta, 18 Februari 2010

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI  
KETUA RAPAT,**



**IR. NURDIN TAMPUBOLON**  
No. A-01